

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan *good governance* di Indonesia ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Setelah itu, dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Setelah undang-undang tersebut selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Akan tetapi, kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan praktik KKN serta mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, salah satunya dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik dipusat maupun didaerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Adapun tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan yang diharapkan, meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu dari segi organisasinya, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur. Dari aspek manajemen pemerintahan tersebut diatas, terdapat sasaran yang dituju dan menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini, yaitu berupaya melakukan penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dijunjung tinggi nilai akuntabilitasnya adalah pelaporan aset negara yang harus dibuat secara transparan, sehingga publik bisa menilai dengan baik kinerja pemerintah.

Aset negara atau yang biasa disebut barang milik negara saat ini selalu diinventaris secara mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah dan secara berkala dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Negara untuk diaudit dan dinilai

pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/Daerah Sesuai PP No. 6 tahun 2006 meliputi kegiatan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dengan beragamnya cara pengelolaan khususnya inventaris BMN di setiap instansi pemerintah, cukup membuat proses inventarisasi BMN menjadi sangat kompleks, Sehingga pada saat dilaporkan ke BPK ataupun Dirjen Kekayaan Negara harus diubah lagi kedalam format yang telah disesuaikan. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka ketersediaan suatu sistem pengolah informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan BMN sangat diperlukan. Dengan adanya suatu sistem informasi yang terpadu maka seluruh informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pelaporan BMN dapat tersedia sesuai dengan format yang diinginkan. Seluruh transaksi dalam pengelolaan BMN dapat tercatat secara terpadu dan dapat diproses langsung menjadi sebuah pelaporan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan sistem pelaporan pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan membuat suatu sistem aplikasi yaitu sistem informasi manajemen yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK BMN) yang meliputi Neraca (Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya) dan Catatan atas Laporan keuangan.

SIMAK BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial (*Manajerial Report*). SIMAK BMN diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 bagian keempat tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Aplikasi SIMAK BMN ini diwajibkan untuk digunakan diseluruh instansi pemerintah terhitung semester II tahun anggaran 2008 sesuai dengan Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) Nomor S/350/PB.7/2008 tentang Launching Aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi ini diinstall disetiap instansi Pemerintah dan dibuat berjenjang sesuai dengan hirarkinya. Dimasing-masing instansi juga ditunjuk seorang operator yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan aplikasi ini. Dalam aplikasi SIMAK BMN tersebut terdapat data-data yang merupakan aset yang dimiliki masing-masing satker, dan aset tersebut merupakan BMN (Barang Milik Negara), adapun suatu aset dikatakan BMN menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, perolehan lainnya yang sah antara lain transfer masuk, hibah, pembatalan, penghapusan dan rampasan/ sitaan.

Sebagai salah satu satuan kerja yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tentunya juga menggunakan aplikasi ini. Bagian yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem ini adalah urusan umum dan kepegawaian dibawah sub bagian tata usaha. Aplikasi ini digunakan untuk menggantikan sistem lama yang telah berjalan. Dengan adanya SIMAK BMN ini sangat bermanfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam membantu kelancaran pelaporan BMN dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Penggunaan sistem pelaporan ini tentunya mempengaruhi proses kerja urusan umum dan kepegawaian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari khususnya dalam mendaftarkan dan menginventarisir BMN yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Proses inventarisasi yang dilakukan dalam SIMAK BMN memuat informasi mengenai seluruh BMN yang dikelola oleh suatu instansi tersebut.

Adapun peranan SIMAK BMN yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui dan meninjau sejauh mana sistem informasi yang sedang berjalan telah mampu memenuhi kebutuhan organisasi, hal ini dapat dilihat dari segi teknis, operasional, dan ekonomis khususnya dalam lingkup kegiatan pengelolaan aset organisasi serta dapat meminimalisir resiko pada saat ini dan dikemudian hari.

Selain aplikasi SIMAK BMN, terdapat juga aplikasi persediaan yang sama-sama penting dalam penyusunan laporan keuangan. pengertian dari aplikasi

persediaan yaitu satu aplikasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berkaitan erat dengan aplikasi SIMAK BMN, karena nilai persediaan akhir sangat dibutuhkan untuk membuat laporan BMN dan laporan keuangan, yang nantinya nilai persediaan dari aplikasi persediaan tersebut akan terdapat dalam neraca yang tergolong kedalam aset lancar, dan nilai dari aplikasi SIMAK BMN, nantinya akan muncul pada laporan neraca khususnya tergolong aset tetap.

Aplikasi persediaan merupakan aplikasi khusus untuk menghitung stok barang persediaan yang ada, aplikasi ini ada karena persediaan merupakan aset lancar yang tergolong perputarannya sangat cepat, sehingga sangat dibutuhkan satu aplikasi yang fungsinya untuk mengontrol barang persediaan yang keluar masuk.

Penerapan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan diharapkan juga dapat mempermudah dalam penyampaian informasi laporan keuangan khususnya dalam pengelolaan aset negara dan penggunaannya dapat mendukung kinerja organisasi semakin baik lagi.

Untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dihasilkan dari Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dengan dukungan dari aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) dan aplikasi persediaan. Ketiga aplikasi tersebut saling mempengaruhi terhadap proses pembuatan laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun setiap semester oleh setiap satuan kerja dan dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat kementerian masing-masing, Sebuah laporan, baik itu laporan BMN, laporan persediaan ataupun laporan keuangan akan baik dan benar adanya, jika pengadaan dan pengelolaan BMN nya pun secara teknis berjalan dengan baik, suatu sistem yang baik harus dibarengi dengan berbagai macam pengadaan barang maupun pengelolaan barang yang baik pula, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila kita melihat keadaan yang sebenarnya secara langsung, semua barang berupa aset yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan dibandingkan dengan data yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN pada satker 429780 tahun 2015 akan terjadi perbedaan, karena dalam SIMAK BMN hanya ada 141 jenis barang yang terdaftar, yang terdiri dari 1768 jumlah barang, sedangkan kenyataannya jumlah aset yang berada saat ini lebih dari data tersebut diatas , Ini berarti ada beberapa barang yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi yang belum terdaftar sebagai aset dalam aplikasi SIMAK BMN, Padahal nilai aset merupakan hal yang paling penting dalam laporan keuangan.

Dari permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan dari hasil penelitian itu penulis mengambil judul **“Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah terhadap Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

Dilihat dari faktor-faktor pendukung untuk penyusunan laporan keuangan, maka identifikasi masalah yang penulis dapatkan yaitu:

1. Adanya aset-aset negara yang belum di kelola dengan baik.
2. Sulitnya pengawasan dan pengelolaan terhadap barang milik negara.
3. Terdapat barang yang tidak terdaftar sebagai aset/ barang milik negara.
4. Sulitnya pengawasan terhadap barang persediaan yang keluar
5. Dibutuhkan peranan dari aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan untuk penyusunan laporan keuangan (khususnya nilai neraca).
6. Terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penggunaan aplikasi-aplikasi penyusunan laporan keuangan tersebut.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah Informasi yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)?
2. Apa sajakah Informasi yang terdapat dalam aplikasi Persediaan?

3. Apakah peranan dari aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan terhadap Penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi” ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa saja informasi yang terdapat dalam aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
2. Mengetahui apa saja informasi yang terdapat dalam aplikasi Persediaan.
3. Mengetahui peranan aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi yang dipelajari khususnya mengenai ekonomi dan akuntansi pemerintahan.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan yang luas dan ilmu yang lebih mendalam mengenai aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan yang digunakan untuk pengelolaan barang milik negara dan mengetahui proses pembuatan laporan keuangan pada instansi pemerintahan.

### b. Bagi Instansi

Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi di tahun-tahun selanjutnya.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dan melengkapi bahan studi bagi pihak lain yang membutuhkan dalam bidang akuntansi pemerintahan khususnya dalam pengelolaan aset dan persediaan.

### **1.3.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis, Namun penulis mengangkat beberapa penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan, Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anggita dan Edi (2013)	Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.	Untuk Mengetahui Efektifitas suatu BMN dihubungkan dengan Faktor-Faktor Permasalahan yang ada, yaitu dihubungkan dengan tingkat pendidikan pengguna, lama mengoprasikan dll.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Anggita dan Edi (2013), memfokuskan terhadap berapa besar efektivitas SIMAK BMN dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Edi Masrudin (2015)	Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi barang Milik Negara terhadap pengelolaan aset	Simak BMN memiliki peranan penting terhadap pengelolaan aset kerana minim <i>error</i> . selain itu mudah untuk pendokumentasian ataupun penatausahaan terhadap BMN.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Edi Masrudin hanya membahas tentang SIMAK BMN terhadap Pengelolaan aset, Sedangkan penulis mengambil tambahan dengan aplikasi persediaan dihubungkan dengan penyusunan laporan keuangan.

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya. maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran dan pengetahuan tentang SIMAK BMN, persediaan dan laporan keuangan pemerintahan.